

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



SHARING KNOWLEDGE

**MELALUI PENGUATAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
KEPADA ASN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**

NAMA : I NENGAH SUKADANA, S.H., M.H.
NIP : 197703042001121002
JABATAN : KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Laman: <http://bali.kemenkumham.go.id> Telepon: 0361-228718

LAPORAN
TENTANG
SHARING KNOWLEDGE
MELALUI PENGUATAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
KEPADA ASN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam lanskap administrasi publik yang semakin kompleks dan dinamis, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi imperatif mutlak bagi setiap institusi negara. Guna mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, instansi pemerintah dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka, tetapi juga secara proaktif mengantisipasi dan mengelola berbagai potensi hambatan. Di sinilah peran Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik menjadi krusial. Ini bukan sekadar tren, melainkan sebuah kerangka kerja sistematis yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis dan operasional. Implementasi manajemen risiko yang efektif adalah fondasi bagi kinerja organisasi yang resilient dan adaptif.

Manajemen risiko dalam konteks sektor publik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor swasta. Tujuan utamanya untuk memastikan pelayanan publik yang optimal, penggunaan anggaran yang efisien, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Risiko dalam sektor publik dapat muncul dari berbagai sumber, mulai dari perubahan kebijakan, kendala anggaran, isu integritas, bencana alam, hingga tuntutan publik yang meningkat. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko ini secara dini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah kegagalan program atau proyek pemerintah. Ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif dan berbasis bukti.

Penerapan manajemen risiko yang komprehensif mendorong terwujudnya budaya sadar risiko di seluruh lapisan organisasi. Budaya ini mengacu pada kesadaran kolektif bahwa setiap individu dalam organisasi, dari pimpinan hingga staf pelaksana, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mengelola risiko yang terkait dengan area kerjanya. Dengan kata lain, manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari pola pikir dan proses kerja sehari-hari, bukan sekadar tugas tambahan yang berdiri sendiri. Ini membantu mencegah silo mentality dan mendorong kolaborasi lintas unit dalam menghadapi potensi ancaman.

Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik. Dengan memahami potensi risiko, instansi dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih cerdas, merancang kebijakan dan prosedur yang lebih kuat, serta membangun sistem pengendalian internal yang lebih kokoh. Proses ini memungkinkan pemerintah untuk beroperasi dengan lebih terencana, mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Pada akhirnya, ini akan mendukung terciptanya layanan publik yang lebih berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan penguatan kapasitas di bidang manajemen risiko sektor publik menjadi sangat relevan dan mendesak bagi aparatur sipil negara (ASN) di berbagai instansi pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. ASN perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar mampu menginternalisasi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini mencakup pemahaman tentang kerangka kerja manajemen risiko, metode identifikasi dan penilaian risiko, serta strategi mitigasi dan pemantauan yang efektif. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan bahwa ASN dapat menjadi agen perubahan dalam membangun organisasi yang lebih tangguh dan akuntabel.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari tulisan ini adalah untuk melaporkan secara komprehensif pelaksanaan kegiatan "***Sharing Knowledge Melalui Penguatan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik kepada ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali***" sebagai tindak lanjut implementasi Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kegiatan ini dilaksanakan, materi yang disampaikan, partisipasi ASN, serta dampak yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas manajemen risiko di lingkungan Kantor Wilayah. Kami ingin menggarisbawahi pentingnya pengembangan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. **Memberikan pemahaman konseptual dan praktis** kepada ASN mengenai definisi, prinsip, tahapan, serta manfaat manajemen risiko dalam organisasi sektor publik.
2. **Meningkatkan kemampuan ASN dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merespons risiko** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
3. **Mendorong terbentuknya budaya kerja yang sadar risiko**, sehingga setiap ASN mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan kerja.
4. **Mendukung penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.
5. **Menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab kolektif** dalam penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan *Sharing Knowledge Melalui Penguatan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik kepada ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali* adalah Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

B. Kegiatan Yang dilaksanakan

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik telah dilaksanakan *Sharing Knowledge* melalui Penguatan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik kepada ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan kesadaran risiko di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Kegiatan ini merupakan inisiatif strategis penulis yang menyadari betul pentingnya peningkatan kompetensi ASN dalam menghadapi dinamika risiko di lingkungan kerja. Pelaksanaannya dirancang agar partisipatif dan memberikan pemahaman mendalam bagi seluruh peserta. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Darmawangsa pada hari Kamis, 17 Juli 2025 pukul 13.00 s.d 15.00 WITA yang dihadiri oleh 15 (lima belas) orang perwakilan ASN dari setiap divisi, bagian, serta bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

1. Pemahaman Konseptual dan Praktis

- Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian materi awal oleh penulis selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum yang fokus pada definisi, prinsip dasar, siklus atau tahapan manajemen risiko (identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan), serta manfaat konkret penerapannya dalam konteks organisasi sektor publik. Materi ini disajikan secara interaktif untuk memastikan ASN di Lingkungan kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mendapatkan gambaran menyeluruh hal ini penting sebagai fondasi pertama untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis yang kokoh kepada seluruh peserta sebelum masuk ke aplikasi yang lebih mendalam.

2. Identifikasi dan Analisis Risiko

- Kegiatan dilanjutkan dengan berfokus pada penjelasan terkait praktik identifikasi risiko serta analisis risiko yang spesifik yang mungkin dihadapi masing-masing unit kerja, hal ini dilakukan agar setelah pemahaman dasar, ASN dapat meningkatkan kemampuan praktis mereka dalam mengenali dan menganalisis risiko yang relevan dengan tugasnya, sekaligus mendorong budaya sadar risiko dengan berpikir kritis terhadap potensi masalah

3. Pengembangan Strategi Mitigasi dan Respons

- Selanjutnya ASN dibimbing untuk mengembangkan strategi mitigasi dan respons yang efektif. Ini mencakup tindakan pengendalian, rencana kontingensi, dan cara melaporkan risiko. Hubungannya dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan ditekankan. Ini adalah

kelanjutan logis untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam merespons risiko secara proaktif. Keterkaitan dengan SPIP secara langsung mendukung penguatan pelaksanaannya sebagai bagian dari akuntabilitas.

4. Diskusi Pembentukan Budaya Risiko

- Sesi ini didedikasikan untuk diskusi terbuka dan berbagi pengalaman di mana setiap ASN didorong untuk melihat setiap interaksi atau pelaporan sebagai "podium" untuk menyampaikan gagasan atau isu risiko. Ini termasuk bagaimana melaporkan risiko, menyarankan perbaikan, dan berkontribusi pada solusi. Diskusi ini tentunya secara langsung mendorong terbentuknya budaya kerja yang sadar risiko di mana setiap individu merasa memiliki peran. Ini juga menumbuhkan komitmen kolektif melalui partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama.

5. Harapan dan Komitmen Berkelanjutan

- Kegiatan ditutup dengan sesi khusus yang menjadi wadah bagi para peserta untuk menyampaikan harapan dan komitmen mereka terkait implementasi manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Ini mencakup harapan terhadap dukungan pimpinan, kebutuhan akan pelatihan lanjutan, serta komitmen pribadi dan kolektif untuk menginternalisasi manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja. Sesi ini juga akan digunakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut sederhana guna memastikan keberlanjutan penerapan manajemen risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Hal ini penting untuk memotivasi ASN dan memastikan bahwa pemahaman yang didapatkan akan ditransformasi menjadi aksi nyata dan berkelanjutan.

C. Hasil Yang Dicapai

Pelaksanaan kegiatan Sharing Knowledge melalui Penguatan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik ini telah menunjukkan hasil yang signifikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian-capaian utama:

1. Peningkatan Pemahaman Konseptual dan Praktis ASN

Seluruh peserta, yang merupakan perwakilan dari divisi, bagian, dan bidang, telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai konsep dasar, prinsip, tahapan (identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan), serta manfaat konkret dari manajemen risiko dalam konteks sektor publik. Sesi interaktif yang dipimpin oleh penulis berhasil menjadi fondasi kuat bagi pengetahuan mereka.

2. Peningkatan Kemampuan Identifikasi dan Analisis Risiko

Melalui penjelasan praktik dan diskusi, ASN kini lebih mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko spesifik yang terkait dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing. Mereka telah dibekali dengan pola pikir kritis untuk mengenali potensi masalah dan memahami dampaknya, yang merupakan langkah krusial dalam mitigasi risiko efektif.

3. Pengembangan Strategi Mitigasi dan Respons yang Lebih Baik

Peserta telah dipandu untuk merancang strategi mitigasi dan respons terhadap risiko yang teridentifikasi. Penekanan pada tindakan pengendalian, rencana kontingensi, dan prosedur pelaporan risiko telah memperkuat kapasitas mereka dalam mengambil langkah proaktif. Selain itu, keterkaitan erat manajemen risiko dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berhasil ditekankan, sehingga ASN memahami peran mereka dalam mendukung akuntabilitas dan reformasi birokrasi.

4. Tumbuhnya Budaya Kerja Sadar Risiko

Sesi diskusi yang mendorong "podium" pribadi telah secara efektif menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengelola risiko. ASN kini lebih termotivasi untuk melaporkan isu, menyarankan perbaikan, dan berkontribusi pada solusi, yang menandakan awal terbentuknya budaya kerja yang lebih sadar dan proaktif terhadap risiko di seluruh Kantor Wilayah.

5. Penguatan Komitmen dan Tanggung Jawab Kolektif

Sesi penutup yang melibatkan penyampaian harapan dan komitmen berhasil memobilisasi tanggung jawab pribadi dan kolektif ASN dalam menerapkan manajemen risiko secara berkelanjutan. Adanya perumusan rencana tindak lanjut sederhana menunjukkan keseriusan dan niat baik untuk menginternalisasi manajemen risiko sebagai bagian integral dari operasional sehari-hari, demi mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang lebih tangguh dan akuntabel.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kegiatan Sharing Knowledge melalui Penguatan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik kepada ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang dilaksanakan pada 17 Juli 2025 merupakan langkah strategis yang sangat relevan dan mendesak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan tersebut telah berhasil mencapai tujuan-tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman konseptual dan praktis ASN mengenai manajemen risiko, memperkuat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merespons risiko, serta secara signifikan mendorong terbentuknya budaya kerja yang sadar risiko. Keterkaitan dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga telah ditekankan dengan baik, menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab kolektif di kalangan ASN untuk menerapkan manajemen risiko secara berkelanjutan. Antusiasme dan partisipasi aktif dari 15 perwakilan ASN dari berbagai unit kerja menegaskan kebutuhan dan kesiapan mereka untuk menginternalisasi prinsip-prinsip ini dalam tugas sehari-hari.

Saran

Berdasarkan antusiasme peserta, disarankan untuk mengembangkan modul pelatihan atau *workshop* lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam. Ini bisa mencakup studi kasus riil yang relevan dengan masing-masing divisi, simulasi penanganan risiko, atau pelatihan penggunaan *tools* manajemen risiko yang lebih teknis.

E. Penutup

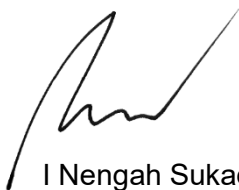
Demikian Laporan Ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alumni,



I Nengah Sukadana



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eem Nurmanah



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Laman: <http://bali.kemenkumham.go.id> Telepon: 0361-228718

DOKUMENTASI

SHARING KNOWLEDGE

**MELALUI PENGUATAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
KEPADA ASN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**



KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BALI

NOTA DINAS
NOMOR: W20 - UM.01.01 – 4141

Yth. : 1. Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Pejabat Manajerial.
Dari : Kepala Kantor Wilayah
Hal : Undangan *Sharing Knowledge* Melalui Penguatan Manajemen
Risiko Organisasi Sektor Publik kepada ASN Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Bali
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Tanggal : 17 Juli 2025

Dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen risiko ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Bali dan sebagai tindak lanjut implementasi Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik, bersama ini diharapkan saudara untuk menunjuk 5 (lima) orang pegawai di masing masing Divisi/Bagian/Bidang untuk mengikuti kegiatan, pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 17 Juli 2025
Waktu : 13.00 s.d 15.00 Wita
Tempat : Ruang Darmawangsa
Kegiatan : *Sharing Knowledge* Melalui Penguatan Manajemen
Risiko Organisasi Sektor Publik kepada ASN Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Bali

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eem Nurmanah



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar Telp/Fax. (0361)-228718
Laman : bali.kemenkum.go.id / Surel : kanwilbali@kemenkum.go.id

NOTULA

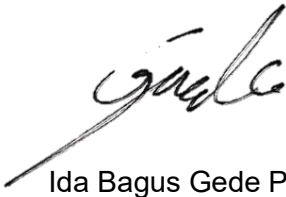
Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juli 2025
Pukul : 13:00 – 15.00 WITA
Tempat : Ruang Darmawangsa
Peserta Rapat
a. Hadir : Terlampir
b. Berhalangan Hadir : -

Acara : *Sharing Knowledge* Melalui Penguatan Manajemen
Risiko Organisasi Sektor Publik kepada ASN Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Bali

Jalannya Kegiatan :

1. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian materi awal oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana yang fokus pada definisi, prinsip dasar, siklus atau tahapan manajemen risiko (identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan), serta manfaat konkret penerapannya dalam konteks organisasi sektor publik.;
2. Kegiatan dilanjutkan dengan berfokus pada penjelasan terkait praktik identifikasi risiko serta analisi risiko yang spesifik yang mungkin dihadapi masing-masing unit kerja;
3. Selanjutnya ASN dibimbing untuk mengembangkan strategi mitigasi dan respons yang efektif. Ini mencakup tindakan pengendalian, rencana kontingensi, dan cara melaporkan risiko. Hubungannya dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan ditekankan;
4. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan berbagi pengalaman di mana setiap ASN didorong untuk melihat setiap interaksi atau pelaporan sebagai "podium" untuk menyampaikan gagasan atau isu risiko. Ini termasuk bagaimana melaporkan risiko, menyarankan perbaikan, dan berkontribusi pada solusi;
5. Kegiatan ditutup dengan sesi khusus yang menjadi wadah bagi para peserta untuk menyampaikan harapan dan komitmen mereka terkait implementasi manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Ini mencakup harapan terhadap dukungan pimpinan, kebutuhan akan pelatihan lanjutan, serta komitmen pribadi dan kolektif untuk menginternalisasi manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja. Sesi ini juga akan digunakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut sederhana guna memastikan keberlanjutan penerapan manajemen risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali;

Notulis



Ida Bagus Gede Pradnya Eka Adnyana P



Disahkan Oleh,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Nengah Sukadana

DOKUMENTASI

Sharing Knowledge Melalui Penguatan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Kepada ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali



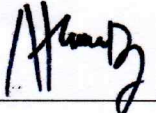


KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Telepon: 0361-228718, Kotak Pos: 3064
Laman: bali.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilbali@kemenkum.go.id

**ABSENSI PENGUATAN MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
KAMIS, 17 JULI 2025**

NO	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	ABSENSI
1	I Nengah Sukadana S.H., M.H.	197703042001121002	IV/a	Kapala Bagian Tata Usaha dan Umum	
2	I PUTU JULIUS BHAYANGKARA SIBA, S.Kom	199907012025061005	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	
3	ILHAM AZIZ ROSADI, S.I.P	199907022025061006	III/a	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
4	KING ABDUL AZIZ, S.I.P.	199909132025061006	III/a	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	
5	MUHAMMAD ABDULLAH HANIF, S.Si.	199910182025061011	III/a	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	
6	AMELIA DWINDA GUSANTI, S.I.Kom.	200003102025062017	III/a	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	
7	MINAR NIA MAGDALENA SITOHANG, S.H.	200005082025062023	III/a	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
8	FRANS WILLIAM SIHOMBING, S.Si.	200009302025061006	III/a	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	
9	GUSTI AYU SUASTI ASTUMAZ DANISWARI, S.H.	200106172025062025	III/a	Analisis Hukum Ahli Pertama	
10	DESAK PUTU SRI WULANDARI, S.Kom.	200107312025062009	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	
11	I MADE DENI CHANDRA KUSUMA, S.H.	200112012025061007	III/a	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
12	DESAK NYOMAN GITA CAHYANI, S.H.	200204152025062008	III/a	Analisis Hukum Ahli Pertama	
13	I MADE DWILAKSANA PUTRA, S.Kom	199501062025061005	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	

NO	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	ABSENSI
14	KOMANG WAHYU SETIABUDI, S.H.	199712072025061007	III/a	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
15	MUHAMMAD NABIL ABDILLAH, S.M.	199804172025061012	III/a	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	
16	ANAK AGUNG NGURAH DHANANJAYA, S.M.	199902132025061009	III/a	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	

Denpasar, 17 Juli 2025

Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum,



I Nengah Sukadana